BAB III

OBJEK KKL

3.1 Gambaran Umum Provinis Jawa Barat

3.1.1 Letak Geografis Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5°50 - 7°50 LS dan 104°48 - 104°48 BT dengan batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa bagian barat dan Banten serta DKI Jakarta di utara, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, antara Samudra Indonesia diSelatan dan Selat Sunda di barat. Dengan daratan dan pulau-pulau kecil (48 Pulau di Samudera Indonesia, 4 Pulau di Laut Jawa, 14 Pulau di Teluk Banten dan 20 Pulau di Selat Sunda), luas wilayah Jawa Barat 44.354,61 Km2 atau 4.435.461 Ha.

Kondisi geografis yang strategis ini merupakan keuntungan bagi daerah Jawa Barat terutama dari segi komunikasi dan perhubungan. Kawasan utara merupakan daerah berdatar rendah, sedangkan kawasan selatan berbukit-bukit dengan sedikit pantai serta dataran tinggi bergunung-gunung ada di kawasan tengah.Dengan ditetapkannya Wilayah Banten menjadi Provinsi Banten, maka luas wilayah Jawa Barat saat ini menjadi 34.816,96 (Data berdasarkan Survei Sosial/Ekonomi 2005)**.**

Ciri utama pada daratan Jawa Barat adalah merupakan bagian dari busur kepulauan gunung api (aktif dan tidak aktif) yang membentang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga ujung utara Pulau Sulawesi. Daratan dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam di selatan dengan

ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, wilayah lereng bukit yang landai ditengah ketinggian 1001.500 m dpl, wilayah dataran luas di utara ketinggian 0 . 10 m dpl, dan wilayah aliran sungai.

Perkembangan Sejarah menunjukkan bahwa Propinsi Jawa Barat merupakan Propinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia (staatblad Nomor : 378). Propinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950,tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat. Selama lebih kurang 50 tahun sejak pembentukannya, wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat baru bertambah 5wilayah, yakni Kabupaten Subang (1968), Kota Tangerang (1993), Kota Bekasi (1996), Kota Cilegon dan Kota Depok (1999). Padahal dalam kurun waktu tersebut telah banyak perubahan baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kemasyarakatan.

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki alam dan pemandangan yang indah serta memiliki berbagai potensi yang dapat diberdayakan, antara lain menyangkut Sumber Daya Air, Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Lahan, Sumber Daya Hutan, Sumber Daya Pesisir dan Laut serta Sumber Daya Perekonomian. Dalam kurun waktu 1994-1999, secara kuantitatif jumlah Wilayah Pembantu Gubernur tetap 5 wilayah dengan tediri dari,20 kabupaten dan kotamadya, dan tahun 1999 jumlah kotamadya bertambah menjadi 8 kotamadya,Kota administratif berkurang dari enam daerah menjadi empat, karena Kotip Depok pada tahun 1999 berubah status menjadi kota otonom.

Dengan lahirnya UU No.23 Tahun 2000 tentang Provinsi Banten, maka Wilayah Administrasi Pembantu Gubernur Wilayah I Banten resmi ditetapkan menjadi Provinsi Banten dengan daerahnya meliputi, Kabupaten Serang,Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten/Kota Tangerang serta Kota Cilegon. Adanya perubahan itu, maka saat ini Provinsi Jawa Barat terdiri dari, 17 Kabupaten dan 9 Kotamadya, dengan membawahkan 592 Kecamatan, 5.20 Desa dan 609 Kelurahan.

3.1.2 Sejarah Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Ibu kotanya berada diKota Bandung. Perkembangan Sejarah menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia (staatblad Nomor : 378). Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat.Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Bagian barat laut provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ibu kota negara Indonesia.

Pada tahun 2000, Provinsi Jawa Barat dimekarkan dengan berdirinya Provinsi Banten, yang berada di bagian barat. Saat ini terdapat wacana untuk mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan, dengan memperhatikan aspek historis wilayah ini, Jawa Barat pada abad ke-5 merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara banyak tersebar di Jawa Barat. Ada tujuh prasasti yang ditulis dalam aksara Wengi (yang digunkan dalam

masa Palawa India) dan bahasa Sansakerta yang sebagian besar menceritakan para raja Tarumanagara. Setelah runtuhnya kerajaan Tarumanagara, kekuasaan di bagian barat Pulau Jawa dari Ujung Kulon sampai Kali Serayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda. Salah satu prasasti dari zaman Kerajaan Sunda adalah prasasti Kebon Kopi II yang berasal dari tahun 932. Kerajaan sunda beribukota di Pakuan Pajajaran (sekarang kota Bogor).

Pada abad ke-16, Kesultanan Demak tumbuh menjadi saingan ekonomi dan politik Kerajaan Sunda. Pelabuhan Cerbon (kelak menjadi Kota Cirebon) lepas dari Kerajaan Sunda karena pengaruh Kesultanan Demak. Pelabuhan ini kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Cirebon yang memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Pelabuhan Banten juga lepas ke tangan Kesultanan Cirebon

dan kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Banten.

Untuk menghadapi ancaman ini, Sri Baduga Maharaja, raja Sunda saatitu, meminta putranya, Surawisesa untuk membuat perjanjian pertahanan keamanan dengan orang Portugis di Malaka untuk mencegah jatuhnya pelabuhan utama, yaitu Sunda Kalapa, kepada Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak.

Pada saat Surawisesa menjadi raja Sunda, dengan gelar Prabu Surawisesa Jayaperkosa, dibuatlah perjanjian pertahanan keamanan Sunda-Portugis, yang ditandai dengan Prasasti Perjanjian Sunda-Portugal, ditandatangani dalam tahun 1512. Sebagai imbalannya, Portugis diberi akses untuk membangun benteng dan gudang di Sunda Kalapa

serta akses untuk perdagangan di sana. Untuk merealisasikan perjanjian pertahanan keamanan tersebut, pada tahun 1522 didirikan suatu monumen batu yang disebut *padrão* di tepi Ci Liwung.

Meskipun perjanjian pertahanan keamanan dengan Portugis telah dibuat, pelaksanaannya tidak dapat terwujud karena pada tahun 1527 pasukan aliansi Cirebon - Demak, dibawah pimpinan Fatahilah atau Paletehan, menyerang dan menaklukkan pelabuhan Sunda Kalapa. Perang antara Kerajaan Sunda dan aliansi Cirebon - Demak berlangsung lima tahun sampai akhirnya pada tahun 1531 dibuat suatu perjanjian damai antara Prabu Surawisesa dengan Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon.

Dari tahun 1567 sampai 1579, dibawah pimpinan Raja Mulya, alias Prabu Surya Kencana, Kerajaan Sunda mengalami kemunduran besar dibawah tekanan Kesultanan Banten. Setelah tahun 1576, kerajaan Sunda tidak dapat mempertahankan Pakuan Pajajaran, ibu kota Kerajaan Sunda, dan akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Banten. Zaman pemerintahan Kesultanan Banten, wilayah Priangan (Jawa Barat bagian tenggara) jatuh ke tangan Kesultanan Mataram.

Jawa Barat sebagai pengertian administratif mulai digunakan pada tahun 1925 ketika Pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Pembentukan sebuah provinsi itu akan sebagai pelaksanaan *Bestuurshervormingwet* tahun 1922, yang membagi Hindia Belanda atas kesatuan-kesatuan daerah provinsi. Sebelum tahun 1925, digunakan istilah *Soendalanden* (Tatar Soenda) atau Pasoendan, sebagai istilah

geografi untuk menyebut bagian Pulau Jawa di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citanduy yang sebagian besar dihuni oleh penduduk yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu.

Pada 17 Agustus 1945, Jawa Barat bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949 Jawa Barat menjadi Negara Pasundan yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar: Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB. Jawa Barat kembali bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1950.

Provinsi Jawa Barat, sejak berdirinya sampai sekarang telah dipimpin oleh 12 orang Gubernur, yaitu : M Sutardjo Kartohadi (1945-1946), Mr.Datuk Djamin (1946), M.Sewaka (1946-1952), R.Muhamad Sanusi Hardjadinata (1952-1956), R.Ipik Gandamana (1956-1960), H. Mashidu (1960-1970), Solihin GP (1970-1975), H. Aang Kunaefi (1975-11985), HR.Yogie SM (1985-1993), R.Nuriana (1993-2003), H.Danny Setiawan (2003 – 2008) dan H. Ahmad Haryawan (2008-sekarang) .

3.1.3 Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat mempunyai visi dan misi untuk dapat merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Visi Provinsi Jawa Barat adalah Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan SejahteraUntuk merealisasikan keinginan, harapan, serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksebilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing,rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintahdaerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat. Maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat adalah Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera. Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang.

Provinsi Jawa Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global. Penjabaran makna dari Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :

Mandiri : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang mampu dan memenuhi segala kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis *e - government*, energi, infrastruktur, lingkungan dan sumber daya air.

Dinamis: adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses pembangunan.

Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.

Agar visi tersebut dapat wujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya mengandung suatu gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Berikut ini Misi Provinsi Jawa Barat:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing.
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal.
3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.

4. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.
5. Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi.

Berdasarkan Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat, diharapkan dapat merealisasikan keinginan, harapan, dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama masyarakat. Misi Provinsi Jawa Barat dapat disebabkan adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakan roda pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan dari misi Provinsi Jawa Barat tersebut di bidang perhubungan yang melingkup:

1. Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa.
2. Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.
3. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Jawa Barat.
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah).
5. Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur.

3.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat

3.2.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Pada Umumnya keberadaan sebuah organisasi tidak akan selalu tetap, melainkan selalu dinamis/berubah sesuai tuntutan perubahan jaman, baik dalam hal bentuk / strukturnya, orang yang duduk didalamnya, sampai kedalam hal misi dan visinya. Itu semua dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan.

Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian merupakan sebuah Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, termasuk sebuah organisasi yang dinamis, karena keberadaannya merupakan hasil perubahan dari dua organisasi yang menangani masalah transportasi di Jawa Barat, yaitu organisasi/instansi vertikal yang bernama Kantor Wilayah X Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Barat dan organisasi /instansi Daerah yang bernama Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Masing-masing institusi tersebut dalam perjalanannya telah mengalami beberapa kali perubahan dan akhirnya dengan diberlakukannya otonomi Daerah melalui UU No. 22 Tahun 1999, Instansi vertikal Kantor Wilayah X Departemen Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Instansi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di likuidasi menjadi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

(Perda) Provinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat yang kemudian Strukturnya disempurnakan dengan Perda No. 5 tahun 2002 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat. Strukturnya disempurnakan dengan Perda No. 5 tahun 2002 tentang Perubahan atas PerdaProvinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sejalan dengan perkembangan isu politik dan pemerintahan, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang isinya berupa panduan pembentukan organisasi perangkat daerah bagi Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang disesuaikan dengan potensi dan beban kerja yang dimiliki masing-masing daerah. Oleh Karena itu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ikut berubah dengan mengacu pada peraturan tersebut dan khusus Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat dan mulai berlaku efektif per Januari 2009.

3.2.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, maka ditetapkan visi Dinas Perhubungan Jawa Barat yaitu: Di dalam Visi Dinas Perhubungan Provinsi Jawan Barat, ada dua kata kunci yang perlu dijelaskan agar terjadi kesamaan persepsi dalam pemahaman visi tersebut:

Pertama, Andal. Kata andal diartikan sebagai tangguh, dapat dipercaya atau terjamin kesanggupannya. Dengan demikian kata Andal dalam Visi , Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah menciptakan suatu sistem transportasi yang tangguh, dapat dipercaya dan terjamin kesanggupannya dalam perencanaan kebijakan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelayanan transportasi pada masyarakat di regional Jawa Barat.

Kedua, Terpadu. Kata terpadu mengandung pengertian telah terjadi penyatuan yang kompak dan harmonis atau dengan kata lain telah disatukan dan dileburkan dengan sempurna. Dengan demikian kata terpadu dalam Visi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mengandung pengertian terciptanya satu kesatuan sarana prasarana transportasi atau terjadi interkoneksi moda yang memudahkan pergerakan barang dan orang dari satu tempat ke tempat lainnya dan terintegrasi dengan pihak-pihak atau kepentingan lainnya di dalam regional Jawa Barat.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain dapat mengetahui peran dan program serta mewujudkan Visi tersebut diatas, maka Misi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia perhubungan yang berkualitas.
2. Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan dan pengadilan pada transportasi yang terpadu.
3. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan ramah lingkuangan.
4. Mewujudkan sistem pelayanan transportasi yang prima.
5. Mewujudkan pengelolaan transportasi yang transparan dan akuntable.

3.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Dasar hukum organisasi Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55) sebagai perubahan tentang Dinas Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor : 40 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi , Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan urusan bidang perhubungan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 46 tahun 2001, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok “Merumuskan Kebijaksanaan Organisasi bidang Perhubungan yang merupakan sebagian kewenangan Desentralisasi Provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan“.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 46 tahun 2001, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan operasional bidang perhubungan
b. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang perhubungan
c. Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas bidang perhubungan meliputi Program, Angkutan, Lalu Lintas, Sarana dan Pengendalian
d. Penyelenggaraan ketatausahaan dinas.

Dalam rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi , Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang transportasi darat, tranportasi laut dan ASDP, transportasi udara, bina system operasional transportasi;
2. penyelenggaraan bidang urusan perhubungan meliputi transportasi darat, transportasi laut dan ASDP, transportasi udara, bina sistem operasional transportasi;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas perhubungan meliputi transportasi darat, tranportasi laut dan ASDP, transportasi udara, bina sistem operasional transportasi;
4. pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
5. pelaksanaan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai landasan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas juga telah dilengkapi dengan peraturan daerah yang memudahkan operasionalisasi pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat melalui, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan.

Kedua peraturan daerah tersebut saat ini sedang dalam proses revisi, yang pada tahun anggaran 2008 telah dilaksanakan Kajian Akademis dan pada tahun anggaran 2009 telah dianggarkan untuk penyusunan Raperda revisi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 21 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2002.

3.2.4 Obsesi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

1. Tertatanya layanan transportasi umum secara terpadu yang diarahkan pada pengembangan angkutan massal dikota Metropolitan Bandung Raya di wilayah bogor Depok Bekasi (BODEBEK) dan Cirebon.
2. Meningkatnya peran dan fungsi pelabuhan Cirebon sebagai Pelabuhan Internasional
3. Terbangunnya Bandara Internasional Jawa Barat sebagai pengganti Bandara Hussein Sastranegara Bandung, sekaligus merupakan Pintu Gerbang Jawa Barat.

4. Terbentuknya BUMD bidang Perhubungan yang berperan sebagai ujung tombak pelayanan dan fasilitator PEMDA dalam pelayanan perhubungan serrta pendanaan pembangunan prasarana dan sarana perhubungan.
5. Mengacu Kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok. Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat disebutkan dalam Pasal 2 Bab II bahwa tugas pokok dinas dalam hal ini Dinas Perhubungan adalah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

3.2.5 Target Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

1. Melengkapi fasilitas lalu lintas jalan diruas jalan provinsi dan jalan negara serta pengingkatan fasilitas bidang ASDP, udara dan POSTEL.
2. Tersusunnya buku pedoman Standar pelayanan Minimal Perhubungan Jawa Barat dan buku Tataran Transportasi Wilayah.
3. Penetapan surat keputusan Gubernur mengenai Denda Kelebihan Muatan.
4. Fasilitas dalam rangka Optimalisasi Bandara Hussein Sastranegara
5. Terselenggarany penerbangan sipil reguler ke Bandara Nusawiru bekerja sama dengan PT.Merpati Nusantara Air Line
6. Mewujudakan kerjasama yang mantap dan sinergi dengan Dinas Instansi serta Mitra-Kerja Perhubungan.

7. Memfasilitasi dalam rangka terwujudnya kerjasama fihak Investor dengan PEMDA Provinsi Jawa Barat
8. Menyiapkan proposal dan konsep pembentukan BUMD bidang Transportasi dan Telekomunikasi melalui kerjasama dengan BUMD terkait.

3.2.6 Rencana Strategis Dinas Perhubungan provinsi Jawa Barat

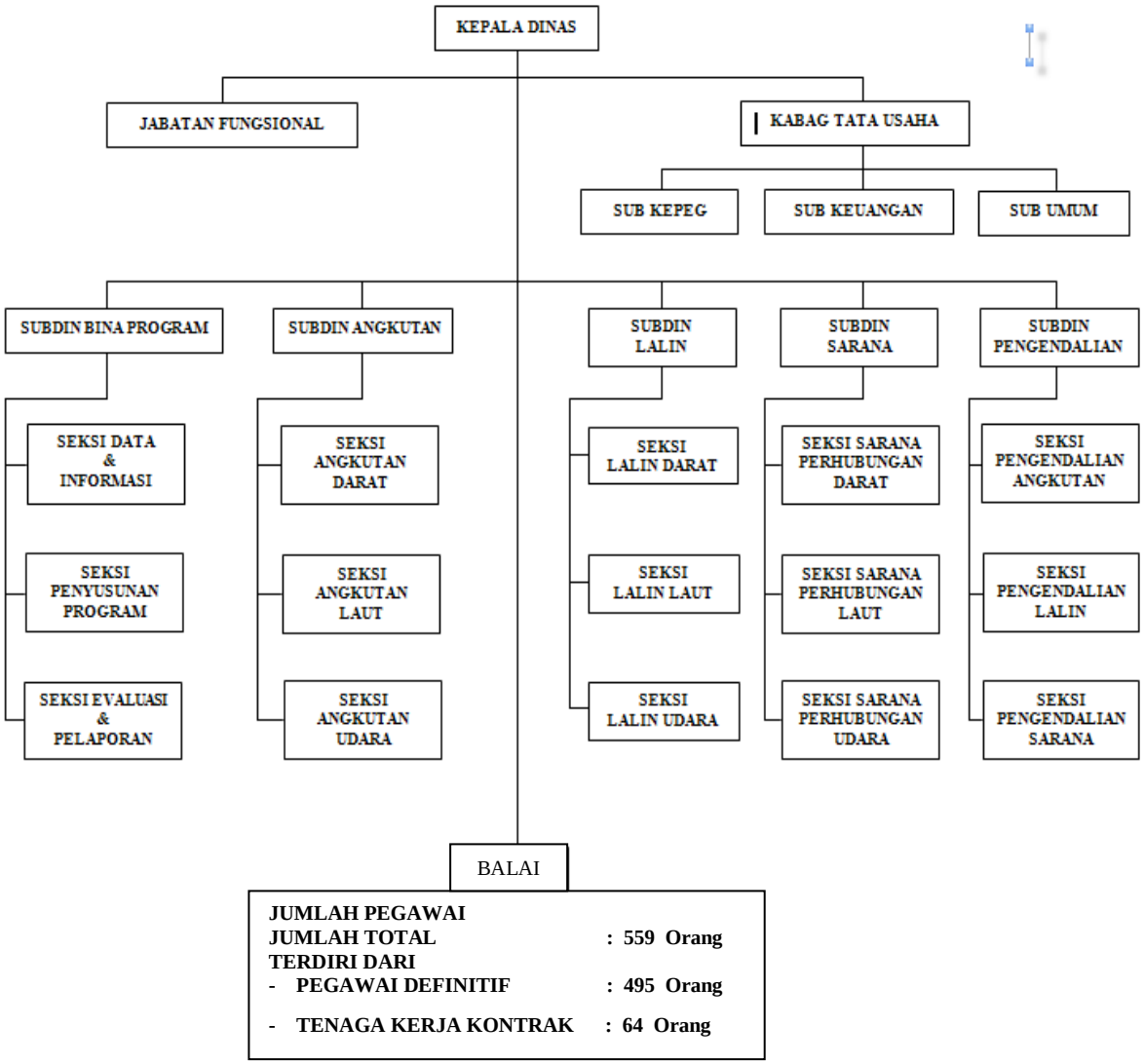
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk rentang waktu lima tahun yaitu 2008-2013. Dokumen ini menjadi sangat penting karena merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang harus dipertanggungjawabkan.

Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat secara spesifik dan terukur yang dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. Dokumen ini juga disusun untuk menyajikan agenda utama DISHUB JABAR dalam mengatasi persoalan yang belum diselesaikan pada perioda 2003-2008 dan mengantisipasi persoalan yang mungkin muncul pada periode lima tahun kedepan atau 2008-2013 didalam renstra tersebut akan.

Agar dapat merupakan dokumen perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan, perumusan dokumen Renstra ini dilakukan

melalui beberapa tahapan yaitu: menetapkan visi dan misi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, visi dan misi ini ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat, mempertimbangkan isu strategis transportasi Jawa Barat dan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kedua, melakukan penjaringan usulan kegiatan mulai dari unit-unit kerja terkecil hingga pada tingkat bidang/sekretariat. Ketiga, memormulasikan semua usulan yang masuk menjadi satu kesatuan yang utuh dalam bentuk usulan program dan kegiatan. Keempat, mensosialisasikannya kembalai hingga ke unit-unit kerja untuk dipahami agar program dan kegiatan yang akan dilakukan dapat terarah sesuai dengan perencanaan. Pada sisi lain juga untuk mencegah terjadinya.

3.2.7Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat



Berdasarkan Pasal 4 huruf (i) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut ;

1. Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

a) Sub Bagian Kepegawaian

b) Sub Bagian Keuangan

c) Sub Bagian Umum

3. Sub Dinas Bina Program, membawahkan :

a) Seksi Data dan Informasi

b) Seksi Penyusunan Program

c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan

4. Sub Dinas Angkutan, membawahkan :

a) Seksi Angkutan Darat

b) Seksi Angkutan Laut

c) Seksi Angkutan Udara

5. Sub Dinas Lalu Lintas, membawahkan :

a) Seksi Lalu Lintas Darat

b) Seksi Lalu Lintas Laut

c) Seksi Lalu Lintas Udara

6. Sub Dinas Pengendalian, membawahkan :

a) Seksi Pengendalian Angkutan

b) Seksi Pengendalian Sarana

c) Seksi Pengendalian Lalu Lintas

7. Sub Dinas Sarana dan Prasarana, membawahkan :

a) Seksi Sarana Perhubungan Darat

b) Seksi Sarana Perhubungan Laut

c) Seksi Sarana Perhubungan Udara

Catatan : Lokasi Kantor di Jl. Sukabumi no. 1 Bandung.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Khusus Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat diatur berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf (i) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 tahun 2002 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, dimana dalam ketentuan tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat memiliki 5 (lima) unit Pelaksana Teknis Dinas, yaitu :

a. Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) dengan struktur sebagai berikut :
    1. Kepala Balai
    2. Sub Bagian Tata Usaha
    3. Seksi Sarana dan Prasarana
    4. Seksi Tata Operasional
    5. Seksi Keselamatan
    6. Instalasi (tersebar di beberapa kabupaten di Jawa Barat)
    7. Kelompok Jabatan Fungsional

    Catatan : Lokasi Kantor di Jl. Raya Cinunuk Bandung.
b. Balai Pengelolaan Bandar Udara, memiliki struktur organisasi sebagai berikut :
    1. Kepala Balai
    2. Sub Bagian Tata Usaha
    3. Seksi Sarana dan Prasarana
    4. Seksi Tata Operasional

5. Instalasi (Bandara Nusawiru Ciamis)
6. Kelompok Jabatan Fungsional

   Catatan : Lokasi Kantor di Jl. Sukabumi no. 1 Bandung.

c. Balai Pengawasan Spektrum dan Frekuensi Radio, memiliki struktur organisasi sebagai berikut :
   1. Kepala Balai
   2. Sub Bagian Tata Usaha
   3. Seksi Identifikasi
   4. Seksi Penertiban
   5. Kelompok Jabatan Fungsional

      Catatan : Lokasi Kantor di Jl. Laswi no. 7 Bandung.

d. Balai Pelayanan dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Wilayah I (Bogor – Purwakarta) memiliki struktur organisasi sebagai berikut :
   1. Kepala Balai
   2. Sub Bagian Tata Usaha
   3. Seksi Pelayanan
   4. Seksi Pemeriksaan
   5. Instalasi (tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat)
   6. Kelompok Jabatan Fungsional

      Catatan : Lokasi Kantor di Bogor

e. Balai Pelayanan dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Wilayah II (Cirebon – Priangan) memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Balai
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Pemeriksaan
5. Instalasi (tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat)
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Catatan : STRUKTUR ORGANISASI terlampir.

3.3 Sistem Informasi Kepegawaian di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Sistem Informasi Kepegawaian adalah sistem yang mampu memberikan informasi data-data pegawai pada suatu perusahaan maupun instansi yang saling berinteraksi mencapai tujuan yang telah ditargetkan.

Sistem Informasi Kepegawaian di Dinas Propinsi Jawa Barat ini dapat membantu pegawai khususnya di Sub bagian Kepegawaian dalam hal ini agar bisa memperoleh suatu informasi maupun penginputan dan pengeditan data pegawai di Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat. Disamping itu dengan implementasi perangkat lunak ini, data pegawai baik data personal maupun data keahlian dapat diperoleh lebih cepat dibandingkan dengan pengolahan data yang dilakukan secara manual seperti sekarang ini dengan mengumpulkan data pegawai dari banyak arsip atau file.

Tujuan dari sebuah Sistem Informasi Kepegawaian adalah untuk mendukung efisiensi dan integritas pengelolaan data-data kepegawaian secara terintegrasi. Dengan rancangan berbasiskan jaringan lokal (LAN) maupun internet, Sistem Informasi Kepegawaian bisa diakses dimana saja dan kapan saja oleh pengguna sesuai dengan hak akses yang telah ditentukan.

Melalui jaringan internet, para pegawai baik pegawai biasa ataupun pegawai di Subbagian Kepegawaian di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dapat melihat profile dari Subbagian Kepegawaian, informasi kepegawaian seperti data-data pegawai yang bekerja sekarang

berdasarkan jabatan, golongan, usia dll.dan layanan kepegawaian yaitu prosedur atau pengertian tentang Calon PNS, cuti, kenaikan pangkat dan tunjangan keluarga sehingga membantu pegawai dalam memahami kedudukan serta peran sertanya di Dinas Perhubungan.

sistem informasi tentang kepegawaian berbasis web yang dibangun berdasarkan suatu analisa dan desain Tekstruktur dengan pemodelan waterfall. Sedangkan basis datanya dibangun dengan menggunkana MySQL yaitu Win MySQL admin Tool yang dapat digunakan dalam untuk membantu proses pembangunan perangkat lunak ini adalah Microsoft Visio untuk pembuatan model sistemnya, Dreamweaver MX untuk web design dan PHP (Personal Home Page) untuk bahasa pemrogramannya.

Sistem Informasi kepegawaian yang berkembang pesat sekarang ini sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah dimasa moderen harus bersikap dalam melayani masyarakatnya. Inilah alasan lain mengapa di dinas perhubungan propinsi jawa barat dipaksa untuk mulai mengkaji fenomena yang ada agar yang bersangkutan dapat secara benar dan efektif mereposisikan peranan dalam melayani masyarakat.

Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja pemerintah dalam melakukan kegiatan ekonominya, namun juga yang diberikan pemerintah secara efektif dan efesien.Hubungan yang erat antara dinas perhubungan propinsi jawa barat dan masyarakat sebagai pihak yang harus diperhitungkan kesejahteraan dan kualitas kehidupannya.